

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk di suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi memiliki pengertian suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang, misalnya politik, ekonomi, sosial dan budaya. Di negara-negara miskin, perhatian utama lebih terfokus pada dilema kompleks antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan, namun keduanya hampir sangat sulit diwujudkan dalam waktu yang bersamaan, pengutamaan yang satu akan menuntun pengorbanan yang lain. Pembangunan ekonomi yang lebih tinggi mensyaratkan penerimaan GNP yang tinggi pula. Namun yang menjadi masalah bukan hanya tingkat GNP yang tinggi, tapi bagaimana hasil dari pembangunan ekonomi itu dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (Todaro, 2000).

Keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Secara sederhana pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perubahan

dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah dari tahun ke tahun. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari apa yang telah dicapai pada masa sebelumnya. Secara teoritis dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan suatu masyarakat, semakin baik pula tingkat kesejahteraannya.

**Tabel 1.1**  
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2009-2015 (persen)

	Jakarta	Jawa Barat	Banten	Jawa Tengah	D.I. Yogyakarta	Jawa Timur
2009	5.02	4.19	4.69	5.14	4.43	5.01
2010	6.51	6.09	5.94	5.84	4.88	6.68
2011	6.73	6.50	7.03	5.30	5.21	6.44
2012	6.53	6.50	6.83	5.34	5.37	6.64
2013	6.11	6.34	7.13	5.14	5.49	6.08
2014	5.91	5.09	5.47	5.28	5.16	5.86
2015	5.88	5.03	5.37	5.44	4.94	5.44
Rata-Rata	6.09	5.67	6.06	5.35	5.09	6.02

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten dapat dikatakan dalam kondisi yang signifikan jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi

Provinsi Banten tergolong tinggi dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dalam enam tahun terakhir sebesar 6,06% per tahun. Provinsi DKI Jakarta berada pada peringkat pertama dari enam provinsi yang ada di Pulau Jawa dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,09%. Provinsi Banten menempati peringkat kedua dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,06%, kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur pada urutan ketiga dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,02%, Provinsi Jawa Barat sebesar 5,67%, Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,35%, dan Provinsi D.I Yogyakarta sebesar 5,09%.

Menurut Todaro (2004) ketimpangan memiliki dampak yang positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju dan berkembang untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrem antara lain adalah inefisiensi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil untuk kesejahteraan masyarakat.

Ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan yang pasti timbul dalam pembangunan. Ketimpangan yang lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan pembangunan ekonomi secara wajar memang akan terjadi dalam proses pembangunan ekonomi seiring dengan adanya perbedaan sumber daya alam dan infrastruktur yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Walaupun pada dasarnya kesenjangan pembangunan andalan inherent dengan

proses pembangunan itu sendiri (Ardani, 1992). Ketimpangan ekonomi sering digunakan sebagai indikator perbedaan pendapatan perkapita rata-rata, antar kelompok tingkat pendapatan, antar kelompok lapangan kerja, dan antar wilayah.

Ketimpangan yang terjadi di Provinsi Banten disebabkan oleh banyak faktor. Seperti pada teori Myrdal dalam Jhingan (1990), ketimpangan pendapatan berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah yang lainnya tetap terlantar. Menurut Myrdal, ketidakmerataan pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan, hal ini disebabkan karena adanya dampak balik (*backwash effect*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan dampak sebar (*spread effect*). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dampak balik salah satunya adalah investasi.

Investasi merupakan penanaman modal di suatu perusahaan tertentu. Investasi bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Dengan adanya penambahan investasi seperti ini maka dapat menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini dikarenakan dalam proses produksi barang dan jasa meningkat yang pada gilirannya akan menyerap angkatan kerja. Sehingga tenaga kerja tersebut memperoleh upah dan tenaga kerja tersebut memiliki daya beli. Dengan semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang dan jasa dimana tenaga kerja dapat diserap

lebih banyak juga sehingga terjadi pemerataan pendapatan per kapita (Sukirno, 2004).

Investasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan investasi diharapkan pemerintah mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Suparmoko (1998) investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital (*capital stock*), *capital stock* yang dimaksud tidak hanya berupa modal atau fisik seperti tanah, pabrik-pabrik, dan mesin-mesin tetapi juga berupa sumber daya manusia atau modal tenaga kerja. Penanaman modal yang dilakukan dengan tepat dan dalam jangka panjang mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.

Penanaman modal atau investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dapat menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan pendapatan baik itu berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini terjadi karena sebagian investasi swasta hanya terpusat di beberapa daerah, bahkan ada beberapa daerah yang memiliki tingkat investasi yang sangat rendah. Para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri hanya menilai daerah-daerah yang memiliki potensi atau keuntungan yang menjanjikan sehingga akan dijadikan sebagai tempat untuk berinvestasi. Gambar 1.1 merupakan gambar realisasi perkembangan nilai investasi di Provinsi Banten pada tahun 2009 hingga tahun 2015.

**Gambar 1.1**  
Realisasi Nilai Investasi Provinsi Banten Tahun 2009-2015 (juta rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa laju perkembangan investasi di Provinsi Banten cenderung meningkat pesat. Pada tahun 2009 investasi sebesar Rp.28.322.254 juta meningkat cukup melejit di tahun 2010 sebesar Rp.44.376.639 juta, lalu terjadi penurunan yang sangat signifikan di tahun 2011 sebesar Rp.16.025.519 juta dan di tahun 2013 menjadi Rp.23.790.339 juta. Kemudian kembali mengalami kenaikan yang amat tinggi di tahun 2014 sebesar Rp.47.481.889 juta. Perkembangan investasi di Provinsi Banten yang cenderung meningkat tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari kondisi lokasi, sumber daya alam maupun sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Setelah diberlakukannya UU RI No. 32 dan 33 tahun 2004, peranan Pemerintah Daerah sangat dominan dalam menentukan kebijakan didaerahnya. Salah satu strategi pembangunan nasional adalah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan cara memperhatikan pada pembangunan ekonomi daerah kabupaten dan kota. Pembangunan ekonomi daerah yang merata antara

kabupaten dan kota diharapkan akan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional.

Provinsi Banten merupakan daerah hasil pemekaran. Penetapan Provinsi Banten disahkan pada tanggal 17 Oktober 2000 didasari oleh UU No. 23 Tahun 2000. Berdasarkan hasil pemekaran tahun 2000, saat ini Provinsi Banten memiliki 8 daerah admistrasi yaitu terdiri dari 4 kabupaten dan 4 kota dan Kota Serang dipilih sebagai ibukota provinsi. Keempat kabupaten tersebut adalah Tangerang, Serang, Pandeglang dan Lebak, sedangkan keempat kota yaitu Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan.

**Tabel 1.2**  
Jumlah Pertumbuhan Penduduk Provinsi Banten Tahun 2009-2015 (jiwa)

<b>Kab/Kota</b>	<b>2009</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Kab. Pandeglang	1.099.746	1.172.179	1.181.430	1.188.405	1.194.911
Kab. Lebak	1.258.893	1.228.884	1.239.660	1.259.305	1.269.812
Kab. Tangerang	3.676.684	2.960.474	3.050.929	3.264.776	3.370.594
Kab. Serang	1.345.557	1.434.137	1.448.964	1.463.094	1.474.301
Kota Tangerang	1.554.827	1.869.791	1.918.556	1.999.894	2.047.105
Kota Cilegon	349.162	385.720	392.341	405.303	412.106
Kota Serang	-	598.407	611.897	631.101	643.205
Kota Tangerang Selatan	-	-	1.405.170	1.492.999	1.543.209
<b>Total</b>	<b>9.284.869</b>	<b>9.649.592</b>	<b>11.248.947</b>	<b>11.704.877</b>	<b>11.955.243</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk Provinsi Banten semakin bertambah setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk ini menimbulkan banyaknya kemiskinan karena penambahan penduduk tidak diikuti dengan semakin banyaknya lapangan usaha kerja. Jumlah penduduk Provinsi Banten tahun 2009 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan dari tahun ke tahun tersebut tidak begitu besar yaitu berkisar antara 1-2%.

**Tabel 1.3**  
Indeks Williamson antar Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2009-2015  
(persen)

Kab/Kota	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kab. Pandeglang	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30
Kab. Lebak	0,35	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31
Kab. Tangerang	0,57	0,47	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49
Kab. Serang	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
Kota Tangerang	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Kota Cilegon	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Kota Serang	-	-	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Kota Tangerang Selatan	-	-	-	0,33	0,33	0,33	0,34

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Terlihat pada tabel 1.3 bahwa perkembangan Indeks Williamson antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten mulai tahun 2009 hingga tahun 2015 cenderung stabil. Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Banten cukup rendah meskipun ada beberapa daerah yang tingkat ketimpangannya masih belum merata.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional. Disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan

kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006). Pembangunan ekonomi tersebut mencakup berbagai aspek-aspek ekonomi seperti ekonomi, sosial, politik dan lainnya dimana aspek-aspek tersebut saling bersinergi untuk mencapai keberhasilan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, diperlukan peran serta baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut.

Nilai pendapatan perkapita yang telah dicapai tidak mampu untuk mengatasi masalah yang timbul akibat belum meratanya pembangunan dikarenakan juga terdapat beberapa daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, sedangkan masih ada beberapa daerah lain yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat. Daerah tersebut tidak mengalami perkembangan dan kemajuan yang sama, hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang dimiliki. Kemudian adanya alokasi investasi yang tidak merata di beberapa daerah, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah, pertumbuhan penduduk yang berbeda antar daerah sehingga akan menyebabkan ketimpangan dan perbedaan pendapatan antar daerah tersebut. Berdasarkan data dan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis bermaksud untuk menganalisa kondisi tersebut dengan mengambil judul penelitian **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2009-2015”** untuk menghitung seberapa besar tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Banten dan pengaruh

variabel PDRB perkapita, investasi, dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti yakni faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan Provinsi Banten tahun 2009-2015 dengan beberapa indikator antara lain Indeks Williamson di Provinsi Banten, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita atas dasar harga konstan di Provinsi Banten, Investasi di Provinsi Banten, dan Jumlah Penduduk di Provinsi Banten.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka didalam penelitian ini akan diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita terhadap ketimpangan pendapatan Provinsi Banten tahun 2009-2015?
2. Bagaimana pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan Provinsi Banten tahun 2009-2015?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan Provinsi Banten tahun 2009-2015?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan, tujuan yang akan dicapai untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh PDRB perkapita terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2009-2015.
2. Menganalisis pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2009-2015.
3. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2009-2015.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah Provinsi Banten dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk mendorong peningkatan PDRB perkapita di masa yang akan datang.
2. Sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam memecahkan masalah perihal ketimpangan pendapatan.
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian pada bidang yang sama.